

STUDI EKSPLORATORI HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN LESSCASH SOCIETY DAN KORUPSI (KASUS: SULAWESI TENGGARA)

Wiwin Winarlin Sairu

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya
wiwinwinarlin@gmail.com

ABSTRACT

Corruption has been identified as a complex problem, endemic and is difficult to eradicate. Indonesian has suffered huge losses caused by corruption. Various efforts have been made by Indonesian government to curb corruption. There is a lesscash society policy issued Indonesian Central Bank one of its goals is to curb corruption.

This study explores the relationship lesscash society implementation to corruption by using a technique-depth interviews to the civil servants. Assessing the perception of civil servants related to petty corruption, grand corruption or political corruption and practical politics that can be curbed by a policy lesscash society. This study found that lesscash society is able to curb petty corruption, grand corruption or political corruption but unable to curb practical politics in the context of money politics and lesscash society capable of making a payment system to the government of society be sure and improve accountability.

Keywords: *Corruption, Lesscash Society, Public Sector*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Secara luas korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada sebuah organisasi publik yang dapat menghasilkan uang untuk keuntungan pribadi, partai, suku, kelas, teman, keluarga yang sangat dirahasiakan terhadap pihak lain di luar kalangan sendiri (Azra A, 2002; Umar H, 2012). Senturia (1993) dalam Sarah A (2014) juga mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan,

kepercayaan untuk keuntungan pribadi.

Korupsi dianggap sebagai musuh bersama seluruh masyarakat Indonesia, karena bukan hanya menimbulkan *high cost economy* yang berakibat pada penurunan daya saing terhadap pasar global tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara dan dalam jangka panjang menimbulkan kerusakan moral individu, keluarga, warga masyarakat dan bangsa Indonesia (Soepardi, 2010).

Data *Transparency International Indonesia* tentang indeks persepsi korupsi di dunia, pada 2014 Indonesia menempati posisi 107 dari 175 negara di dunia dengan skor 34

yang dihitung menggunakan skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Pada 2015, Indonesia memiliki skor 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara. Berdasarkan data tersebut korupsi di Indonesia pada tahun 2015 mengalami penurunan namun penurunan kasus korupsi dapat dikatakan belum bermakna yang berarti bahwa korupsi memang sulit diberantas dalam waktu singkat serta telah mengakarnya praktek korupsi di masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Ada indikasi kuat telah terjadinya perubahan pola transaksi keuangan yang dilakukan para koruptor. Ada kecenderungan semua perbuatan koruptif dilakukan dengan tunai, tanpa jejak, tanpa bekas, dan tanpa bukti. Sudah hampir tidak ada koruptor yang mengirimkan uangnya melalui sistem keuangan dan perbankan karena dengan menggunakan sistem tersebut dapat dengan mudah dilacak (Gunawan et al, 2013). Indikasi tersebut bukan tanpa alasan. Selama 2012, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) telah menerima sebanyak dua juta laporan transaksi tunai mencurigakan atau rata-rata 166 ribu laporan setiap bulannya (Gunawan et al, 2013).

Banyak kasus suap menggunakan uang tunai yang telah kita ketahui. Kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima uang tunai sebesar US\$ 660. Kasus suap Irman Gusman yang tertangkap tangan menerima suap Rp 100juta dari sebuah perusahaan gula asal Sumatera Barat. Kasus suap Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta dimana KPK menyita uang tunai sebesar 1,1 miliar

rupiah ketika Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Bank Indonesia sejak 2010 telah mencanangkan program transaksi tanpa uang tunai dan adanya program Gerakan Nasional Non Tunai pada 2014 guna lebih menyadarkan dan mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*lesscash society*). Transaksi non-tunai menggunakan kartu kredit, kartu debit dan uang elektronik (*e-money*) membuat perputaran uang akan lebih mudah dicatat dan dilacak karena terintegrasi dengan sistem keuangan dan dengan begitu akan menyulitkan para koruptor untuk bertransaksi dan pada gilirannya korupsi akan semakin berkurang.

Menurut Bank Sentral Nigeria (CBN), penertiban korupsi yang berkembang melalui beberapa kebocoran sistemik dapat dikekang oleh kebijakan *cashless* (Ayoola J, 2013). *Lesscash society* adalah masyarakat yang memiliki budaya bertransaksi secara tunai, menggunakan lebih banyak instrumen pembayaran non-tunai dibandingkan dengan instrumen pembayaran dalam bentuk tunai (Newsletter Bank Indonesia, 2014). *Lesscash society* tidak mengacu kepada tidak adanya penggunaan transaksi tunai dalam ekonomi, tetapi uang untuk transaksi pembayaran secara tunai berada pada jumlah yang paling minim sedangkan untuk melakukan transaksi pembayaran, digunakan alat transaksi pembayaran non-tunai seperti kartu kredit, ATM+debit, *e-money*, atau layanan transaksi dengan telepon seluler.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga mengatakan

bahwa *lesscash society* memberikan keamanan, kenyamanan masyarakat, mengurangi inefisiensi dari transaksi tunai dan dapat mendukung pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme karena jika transaksi dilakukan secara non-tunai maka akan mudah terintegrasi dengan sistem keuangan. Bertransaksi secara non-tunai juga berguna untuk mengawasi jalannya proses politik dan mengurangi peredaran uang gelap menjelang pemilu, meningkatkan penerimaan pajak, menghemat biaya percetakan dan peredaran uang, melindungi masyarakat dari kejahatan uang palsu, melindungi nasabah dari kejahatan perampokan, dan menghemat kerja Bank Indonesia dalam mengawasi peredaran uang tunai serta memudahkan penegak hukum dan PPATK melakukan *asset tracing* (Gunawan et all, 2013).

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi penerapan *lesscash society* dan korupsi dikalangan pegawai negeri sipil dan juga untuk mengetahui hubungan penerapan *lesscash society* dan korupsi.

B. Paradigma

Dengan jenis penelitian eksploratori yang berbasis kualitatif maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif menurut Neuman (1997) dalam Sandjojo (2016) merupakan analisis sistematis tentang tindakan sosial, yang melalui observasi langsung terhadap orang-orang dalam, agar mendapatkan pemahaman dan interpretasi tentang bagaimana

penerapan *lesscash society* terhadap korupsi menurut sudut pandang pegawai negeri sipil.

Diharapkan dengan informasi, temuan dan perspektif baru ini dapat membantu pembacanya untuk memahami dan melihat dengan cara yang sama dengan peneliti dan juga pegawai negeri sipil terkait sehingga dapat membantu peneliti lainnya yang hendak menjadikan topik serupa sebagai bahan penelitiannya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif eksploratori untuk menggali lebih dalam atau mengeksplorasi penerapan *lesscash society* dan korupsi di Sulawesi Tenggara. Penelitian eksploratori adalah jenis penelitian yang berusaha mencari ide-ide atau hubungan yang baru yang bertujuan menggali secara luas untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai masalah yang diteliti (Widharta dan Sugiharto, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik *experience survey* yakni melakukan wawancara langsung dengan individu-individu yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman didalam permasalahan-permasalahan yang disurvei dalam hal ini pegawai negeri sipil di Sulawesi Tenggara yang terlibat langsung dengan masyarakat dan rawan dengan korupsi. *Experience survey* merupakan salah satu teknik dari penelitian eksploratori yang berusaha menyerap pengetahuan serta pengalaman dari mereka yang telah mengenal subyek umum yang sedang diselidiki (Churchill, 2001:135).

B. Prosedur Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui *depth interview* (wawancara mendalam) dengan informan. Informan yang dipilih adalah pegawai negeri sipil di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang terlibat langsung dengan masyarakat dan rawan dengan korupsi.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang telah ditetapkan adalah pegawai negeri sipil di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang terlibat langsung dengan masyarakat dan rawan dengan korupsi dan dinilai bahwa subjek penelitian mengetahui informasi dan masalah penelitian secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak enam orang pegawai negeri sipil di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Jumlah ini diharapkan ideal dan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara penerapan *lesscash society* dan korupsi.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik langsung (*direct*) melalui wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap informan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mendalam (*depth interview*) pada informan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun

oleh peneliti untuk mengetahui hubungan antara penerapan *lesscash society* dan korupsi, namun *interviewer* masih mempunyai kebebasan untuk menambah variasi pertanyaan untuk memperdalam hasil yang diperoleh. Dalam wawancara ini, peneliti akan merekam jalannya wawancara karena jawaban informan akan dilampirkan secara detail dan jelas untuk dijadikan sebagai data penelitian dan pengolahan data transkrip wawancara akan dilampirkan.

C. Metode Pengolahan Data

1. Transkrip Wawancara (Transcript)

Memindahkan semua data hasil wawancara dari format suara menjadi format teks dengan lengkap, dalam transkrip ini titik dan koma pada ucapan responden dianggap data yang penting. Oleh karena itu, titik dan koma ikut disertakan dalam teks.

2. Open Coding

Dari hasil wawancara yang telah ditulis kemudian diketik selanjutnya dilakukan pengolahan dengan memberikan tanda kode (*open coding*) berupa kata kunci terhadap jawaban-jawaban informan berdasarkan transkrip rekaman wawancara yang telah diperoleh. Tanda kode dibuat dan disesuaikan dengan pengertian agar mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisis. Kode diberikan pada jawaban informan yang telah dipilih yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

3. Axial Coding

Melakukan tabulasi data dengan mempersiapkan tabel-tabel sesuai dengan elemen-elemen pertanyaan dan item-item melalui *axial coding*.

4. **Selective Coding**

Selective coding merupakan hasil riset yang siap untuk data yang telah selesai yaitu data dari *axial coding*. Berdasarkan koding selektif, tema utama atau konsep terakhir menentukan pencarian riset.

5. **Analisis Kualitatif**

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengamati makna-makna tiap kalimat dan kemudian diinterpretasikan, dikaitkan dan dihubungkan dengan informasi yang dicari untuk tujuan penelitian.

RINGKASAN TEMUAN

A. Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di lingkup Kota Kendari, dalam penelitian ini dapat beberapa temuan mengenai sistem *lesscash society* yang dapat mengurangi *petty corruption*, *grand corruption* atau *political corruption* dan *practical politics* maka ditemukan yaitu:

1. Penerapan *lesscash society* dapat memberikan sistem pembayaran yang pasti bagi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas
2. Semua informan menyebutkan pembayaran yang pasti dan terdapat lima informan yang mengatakan bahwa *lesscash society* dapat meningkatkan akuntabilitas
3. Ketiga, penerapan *lesscash society* dapat mengekang *petty*

corruption dan *grandcorruption* atau *political corruption* tetapi kedua jenis korupsi tersebut masih dapat terjadi.

4. Penerapan *lesscash society* tidak mampu mengekang politik praktis atau *practical politics* yang terjadi.

Berdasarkan temuan dapat disimpulkan bahwa *lesscash society* mampu mengekang *petty corruption*, meskipun *petty corruption* masih tetap terjadi karena besaran *petty corruption* hanya dalam jumlah kecil. Masyarakat akan tetap memberi uang jumlah kecil itu ketika masih ada kebutuhan untuk meminta pelayanan lebih yang tidak sesuai dengan prosedur. Ditambah lagi masih ada oknum pemerintah yang merasa bahwa yang dikerjakan adalah lebih dari pekerjaannya sehingga mau menerima pemberian tersebut.

Grand corruption atau *political corruption* masih tetap terjadi ketika masih ada kepentingan antara dua pihak yang saling membutuhkan, tetapi dengan *lesscash society* maka *grand corruption* atau *political corruption* dapat membuat orang-orang yang ingin melakukan sesuatu transaksi dalam jumlah yang besar menjadi hati-hati dan berpikir panjang untuk melakukan transaksi yang tidak benar karena semua data transaksi terekam.

Lesscash society tidak mampu mengekang *money politic* dalam *practical politics* karena dengan transaksi non-tunai justru itu akan memudahkan untuk memberikan uang kepada masyarakat. *Money politic* juga tidak selalu dalam bentuk uang bisa saja akan diberikan dalam bentuk materi lainnya selain uang tunai dan bentuk materi lainnya

tersebut dengan menjadi *lesscash society*.

Secara empiris, ditemukan bahwa *lesscash society* dapat diterapkan dan berjalan dengan baik untuk mengekang korupsi jika didukung oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah sebagai pemberi pelayanan, masyarakat dan pihak swasta sebagai penerima pelayanan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan yang didapatkan didalam penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Harus adanya kesadaran dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk tidak melakukan hal-hal yang koruptif. Jika didukung oleh sistem yang baik, serta fasilitas atau perangkat yang menunjang terlaksananya penerapan *lesscash society* serta sudah didukung oleh kesadaran pemerintah, masyarakat dan pihak swasta diharap *lesscash society* benar-benar mampu menekan tingkat korupsi di Indonesia
2. Masih terbatasnya infrastruktur sebagai perangkat pendukung transaksi non-tunai, sehingga diharapkan Bank Indonesia dengan didukung pemerintah Republik Indonesia dapat memperluas penerimaan infrastruktur dengan penyebaran perangkat alat baca instrumen (EDC) ke seluruh pelosok negeri dan perlu adanya jaringan telekomunikasi yang mendukung transaksi non-tunai yang pada gilirannya akan mendorong kesuksesan *lesscash society* dan menekan tingkat korupsi di Indonesia
3. Agar *lesscash society* mampu menekan tingkat korupsi di Indonesia perlu juga didukung dengan adanya regulasi terkait pembatasan transaksi tunai untuk berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat
4. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen non-tunai sehingga perwujudan *lesscash society* belum seratus persen sehingga dibutuhkan peran otoritas untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa penggunaan uang tunai memiliki banyak konsekuensi biaya tinggi misalnya biaya untuk *cash handling* dan biaya untuk keamanan dan perlu adanya edukasi yang memadai mengenai sarana pembayaran non-tunai yang pada gilirannya *lesscash society* akan terwujud dan diharap mampu menekan tingkat korupsi di Indonesia
5. *Lesscash society* merupakan salah satu bentuk upaya untuk menekan korupsi, akan tetapi faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi sangat beragam serta banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan *lesscash society*. Sehingga penulis berharap akan ada penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian korupsi di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *lesscash society* dalam menekan tingkat korupsi